

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL
(DBH) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PROVINSI
DI INDONESIA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

BOBBY ANDI IRAWAN

B 200 120 349

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL
(DBH) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PROVINSI
DI INDONESIA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

BOBBY ANDI IARWAN
B 200 120 349

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing



(Drs. Agus Endro S, M. Si)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PROVINSI DI INDONESIA

Yang ditulisoleh:

BOBBY ANDI IRAWAN
B200120349

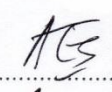
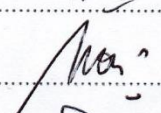

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 22 Oktober 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si. (.....) 
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Noer Sasongko, M.Si., CA., AK (.....) 
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Drs. Atwal Arifin, M.Si., AK (.....) 
(Anggota 2 Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE., M.Si.)

NIK. 642/0627016801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak mendapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 November 2016

Penulis

A yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL", "TGL 20", "AF55FAEF052174264", "6000", and "ENAM RIBU RUPIAH". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

BOBBY ANDI IRWAN

B200120349

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PROVINSI DI INDONESIA

Abstrak

Kondisi Belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi Indonesia kurang diperhatikan, Pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris yang mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se Indonesia. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Purposif sampling, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2013-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2013-2014. Hasil pengujian menunjukan PAD, DAU, dan DAK tidak berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal Provinsi di Indonesia, namun DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Provinsi di Indonesia.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Abstract

Condition Capital expenditures in the budget in the provincial government of Indonesia less of attention, the government should be allocated APBD for capital expenditure and not for consumables used for personnel expenditure and current expenditures. Implementation of regional autonomy gives local governments the opportunity to further develop the potential of the region. The purpose of this study was to obtain empirical evidence to determine whether there is influence revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and DBH (DBH) of the Allocation of Capital Expenditure provincial governments throughout Indonesia. In this research a method of the sample used is a technique purposif of sampling , the population in this research was the whole provinces in indonesia years 2013-2014 .This study using secondary data reports in the form of the realization of regional the government of se indonesia years 2013-2014. The test results showed PAD, DAU and DAK are given not positive and significant impact on capital expenditures in the Province of Indonesia, but DBH given significant effect on capital expenditures in the province of Indonesia.

Keywords: Capital Expenditure, revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and DBH (DBH).

1. PENDAHULUAN

Kondisi Belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi Indonesia kurang diperhatikan, Pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Wandira 2013).

Pelaksanaan otonomi daerah ini diberlakukan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu pada tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten dan/atau kota. Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan proses pemerintahan di daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Maryadi 2014). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.2 (2012), Belanja Modal (*Capital Expenditure*) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Mawarni, Darwanis dan Abdullah 2013).

Otonomi daerah adalah program pemerintah untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meminimalkan kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, di dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan (Meianto, Betri Dan Wenny 2014). Otonomi daerah menekankan terhadap peranan dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan bertambah besar. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menggali pendapatan daerah dan mengalokasikan dana bagi pelayanan umum, serta kewenangan dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wulandari 2014).

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (Asmara 2010).

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pagaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yawa dan Runtu (2015) Hasil penelitian menunjukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal Provinsi Di Indonesia.

2.2.2 Pagaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja modal

Menurut Dewi dan Suyanto (2014) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tolu, Walewangko dan Tumangkeng (2016) menemukan hasil bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal Provinsi Di Indonesia.

2.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja modal

Novianto dan Hanafiah (2015) Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu bentuk Dana Perimbangan merupakan dana yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Novianto dan Hanafiah (2015) menemukan hasil bahwa pengujian hipotesis Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal Provinsi Di Indonesia.

2.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Heliyanto dan Handayani (2016) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal Provinsi Di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2013-2014. Sampel dalam Penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran APBD Provinsi di Indonesia tahun 2013-2014. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, Adapun sampel yang dipilih adalah sampel yang memenuhi kriteria yaitu Provinsi yang mengeluarkan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2013-2014 dan data yang lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti selama tahun pengamatan.

3.1 Variabel Dependen

Belanja Modal (BM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

3.2 Variabel Independen

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD dapat diukur dengan perhitungan :

PAD = Pendapatan Pajak Daerah (PPD) + Pendapatan Retribusi Daerah (PRD) + Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) + Lain-lain PAD yang sah (LPS)

3.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

3.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu

membiayai kebutuhan tertentu, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang (Dewi dan Suyanto 2014).

DAK : Bobot daerah = Bobot Teknis

3.2.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Besarnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), yang terdiri dari DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA), selain dipengaruhi oleh kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil (Darmayasa dan Suandi 2014). DBH dapat diukur dengan perhitungan :

DBH = Bagi Hasil pajak + Bukan pajak

3.3. Metode Analisis Data

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Marsono 2013). Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka ditransformasikan ke dalam persamaan regresi berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + e$$

Keterangan :

BM = Belanja Modal

β = Koefisien Regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

α = Konstanta

e = Faktor lain yang mempengaruhi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Tabel 4.1

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Parameter	Koef. Regresi	Std. Error	t	Sig
Konstanta	-9,452E10	1,702E11	-0,555	0,581
PAD	-0,007	0,021	-0,338	0,737
DAU	0,616	0,343	1,796	0,078
DAK	-1,661	4,612	-0,360	0,720
DBH	0,539	0,061	8,878	0,000
F-Statistik	29,372	R Square		0,666
Signifikansi	0,000	Adjusted R Square		0,643

Sumber: Data Sekunder Diolah 2016

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$BM = -9,452E10 - 0,007X_1 + 0,616X_2 - 1,661X_3 + 0,539X_4 + e$$

Interpretasi:

- 1) Nilai konstanta = $-9,452E10$ bernilai negatif. Mengindikasikan Belanja Modal sebesar $9,452E10$ dengan ketentuan variabel dalam penelitian ini tidak dimasukkan dalam persamaan regresi atau bernilai konstan (0).
- 2) Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (b_1) negatif sebesar $-0,007$. Mengindikasikan apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinaikkan 1 satuan maka akan menurunkan Belanja Modal (BM) sebesar $-0,007$, dengan ketentuan variabel lainnya konstan (0).
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (b_2) positif sebesar $0,616$. Mengindikasikan apabila Dana Alokasi Umum (DAU) dinaikkan 1 satuan maka akan menaikkan Belanja Modal (BM) sebesar $0,616$, dengan ketentuan variabel lainnya konstan (0).
- 4) Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) (b_3) negatif sebesar $-1,661$. Mengindikasikan apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) dinaikkan 1 satuan maka akan menurunkan Belanja Modal (BM) sebesar $1,661$, dengan ketentuan variabel lainnya konstan (0).
- 5) Nilai koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (DBH) (b_4) positif sebesar $0,539$. Mengindikasikan apabila Dana Bagi Hasil (DBH) dinaikkan 1 satuan maka akan menaikkan Belanja Modal (BM) sebesar $0,539$, dengan ketentuan variabel lainnya konstan (0).

5. DISKUSI

5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Propinsi di Indonesia

Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas perwujudan asas desentralisasi.

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah (b_1) bernilai negatif sebesar -0,007, didukung nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-0,338 < -2,000$) dan signifikansi $> 0,05$ ($0,737 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah propinsi di Indonesia tahun 2013-2014.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013), Tolu, dkk (2016), Suwarni (2009), Swastika (2013), Darmayasa Dan Suandi (2014) dalam penelitiannya ditemukan pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal belum tentu juga akan semakin tinggi. selain itu juga mengindikasikan bahwa besarnya PAD tidak menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. pendapatan asli daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja modal.

5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal Propinsi di Indonesia

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien regresi dana alokasi umum (b_2) bernilai positif sebesar 0,616, didukung nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,796 < 2,000$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,078 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal propinsi di Indonesia tahun 2013-2014.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mawarni, dkk (2013), Arwati dan Hadiati (2013), Pratama (2014), sholikhah dan wahyudin (2014), Meianto, dkk (2014) dalam penelitiannya ditemukan dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. DAU yang selama ini diterima oleh daerah diindikasikan tidak digunakan untuk pembangunan daerah, DAU bersifat “*Block Grant*”, memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Modal Belanja Propinsi di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien regresi dana alokasi khusus (b_3) bernilai negatif sebesar -1,661, didukung nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-0,360 < -2,000$) dan signifikansi $> 0,05$ ($0,720 > 0,05$), sehingga dapat

disimpulkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal propinsi di Indonesia tahun 2013-2014.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurdini, dkk (2014), Meianto, dkk (2014), Sulistyowati (2011), Suhendra, dkk (2015), Heliyanto dan Handayani (2016) dalam penelitiannya ditemukan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Hal ini disebabkan karena DAK merupakan bagian dari dana perimbangan yang secara absolut nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Nilai DAK yang relatif kecil tersebut tidak mempengaruhi besarnya belanja modal yang dikeluarkan.

5.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Propinsi di Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan alokasi Belanja Daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi (Putra dan Dwirandra, 2015).

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien regresi dana bagi hasil (b_4) bernilai positif sebesar 0,539, didukung nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,878 > 2,000$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan dana bagi hasil berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal propinsi di Indonesia tahun 2013-2014.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Novianto dan Hanafiah (2015), Heliyanto dan Handayani (2016), Wandira (2013), sholikhah dan wahyudin (2014), Maryadi (2014) dalam penelitiannya

ditemukan dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Hal ini dikarenakan daerahlah yang sebagai penghasil dan pengelola kekayaan daerah itu sendiri yang digunakan untuk membangun dan mensejahterakan daerahnya. Pembangunan tersebut dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan daerah akan mempengaruhi besarnya belanja modal, jadi semakin besar DBH akan berpengaruh terhadap semakin besarnya belanja modal.

6. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan terhadap data sekunder penelitian, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal provinsi di Indonesia. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013), Tolu, dkk (2016), Suwarni (2009), Swastika (2013), Darmayasa Dan Suandi (2014) dalam penelitiannya ditemukan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal provinsi di Indonesia, Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, dkk (2013), Arwati dan Hadiati (2013), Pratama (2014), sholikhah dan wahyudin (2014), Meianto, dkk (2014) dalam penelitiannya ditemukan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
3. Dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal provinsi di Indonesia, Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdini, dkk (2014), Meianto, dkk (2014), Sulistyowati (2011), Suhendra, dkk (2015), Heliyanto dan Handayani (2016) dalam penelitiannya ditemukan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
4. Dana bagi hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal provinsi di Indonesia, Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan Hanafiah (2015), Heliyanto

dan Handayani (2016), Wandira (2013), sholikhah dan wahyudin (2014), Maryadi (2014) dalam penelitiannya ditemukan dana bagi hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati, Dini dan Hadiati, Novita. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat." ISBN: 979-26-0266-6. Semantik 2013:498-507.
- Asmara, Jhon Andra. 2010. "Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam." Vol 3, No 2, Juli 2010: 155-172.
- Darmayasa, I Nyoman Dan Suandi, I Ketut. 2014. "Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam Apbd Pemerintah Provinsi." SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram. Sepember 2014:1-24.
- Heliyanto, Firnandi Dan Handayani, Nur. 2016. "Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." ISSN : 2460-0585. vol 5, No 3, Maret 2016:1-17.
- Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur)." Universitas Brawijaya Malang.
- Indraningrum, Try. 2011. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)." Universitas Diponegoro.
- Maryadi. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012." Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mawarni, Darwanis, dan Abdullah. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta

- Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh).” ISSN 2302-0164. Volume 2, No.2, Mei 2013: 80- 90.
- Meianto, Betri dan Wenny. 2014. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan.” Jurusan Akuntansi, Palembang. Stie Multi Data Palembang.
- Novianto, Riko dan Hanafiah, Rafiudin. 2015. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.” ISSN: 2302-7169. Vol.4 No.1 Januari-Juni 2015: 1-22.
- Nurdini, Wiratno dan Yusriati Nur Farida. 2014. “Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota Di Jawa Barat.” ISSN : 2356 – 2706. Vol. 1, No. 1, Maret 2014:79-92.
- Pangestu, Arifati dan Oemar. 2013. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Seluruh Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009 – 2013).” Universitas Pandanaran Semarang.
- Putra, Ida Bagus Dwi Dan Dwirandra, A. A. N. B. 2015. “Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.” ISSN: 2303-1018. Vol.13.3 Desember 2015: 811-827.
- Sholikhah, Imroatus dan wahyudin, agus. 2014. “Analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di jawa.” AAJ 3 (4) (2014):553-562.

- Suhendra, Sulindawati Dan Adiputra. 2015. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Bali Periode 2009-2013." E-Journal S1 Akuniversitas Pendidikan Ganesha. Volume 3, No.1 Tahun 2015.
- Sulistyowati, Diah. 2011. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal." Universitas Diponegoro Semarang.
- Suwarni, Sri. 2009. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lainlain Pendapatan Yang Sah (LPS), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Kalimantan)." Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Swastika, Lingga. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Di Kabupaten Boyolali Periode Tahun 2005 – 2012." Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tolu, Walewangko Dantumangkeng. 2016. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung)." Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 02 Tahun 2016.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal." ISSN 2252-6765. AAJ 2 (1) (2013):45-51.
- www.djpk.depkeu.go.id
- Yawa Hermawan Dan Runtu, Treesje. 2015. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Di Kota Manado." Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15 No. 04 Tahun 2015.